

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis mengenai prosedur pendaftaran NPWP istri melalui sistem *Coretax* di KPP Pratama Kota Bogor, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Prosedur pendaftaran NPWP istri melalui sistem *Coretax* tergolong cukup mudah dan efisien, karena dilakukan secara daring dan dapat diakses kapan saja. Wajib Pajak hanya perlu menyiapkan dokumen seperti KTP, NPWP suami, serta informasi pendukung lainnya untuk dapat melakukan proses pendaftaran.
2. Pendaftaran NPWP istri hanya dapat dilakukan apabila suami telah memiliki NPWP terlebih dahulu, karena status istri dianggap sebagai subjek pajak yang penghasilannya dapat digabung dengan suami. Ini menjadi syarat utama dalam sistem *Coretax* yang terintegrasi dengan data suami.
3. Hambatan yang sering muncul dalam proses pendaftaran NPWP istri antara lain:
 - Suami belum memiliki NPWP, sehingga pendaftaran tidak dapat dilanjutkan.
 - Ketidaksesuaian atau ketidaksinkronan data identitas dengan database Dukcapil.
 - Istri tidak memiliki penghasilan sendiri, sehingga tidak memenuhi syarat untuk memiliki NPWP terpisah.
 - Ketidakjelasan pilihan status istri dalam sistem *Coretax* yang dapat membingungkan pengguna.
 - Kendala teknis seperti OTP yang tidak masuk, sistem error, atau dokumen yang tidak valid.

4. Petugas di KPP Pratama Kota Bogor memiliki peran penting dalam memberikan bantuan, pengarahan, dan verifikasi atas permohonan yang masuk melalui sistem *Coretax*. Dukungan layanan yang baik mempercepat penyelesaian kendala yang dialami Wajib Pajak.

4.2 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan untuk meningkatkan efektivitas pendaftaran NPWP istri melalui sistem *Coretax* adalah sebagai berikut:

1. Direktorat Jenderal Pajak perlu meningkatkan sosialisasi melalui beberapa keadaan mengenai ketentuan dan teknis pendaftaran NPWP istri termasuk website resmi, maupun leaflet di kantor pajak.
2. KPP Pratama Kota Bogor diharapkan membenahi sistem *coretax* melalui pelayanan konsultasi daring atau melalui helpdesk, agar Wajib Pajak yang mengalami kendala teknis bisa segera mendapatkan solusi.
3. Diperlukan peningkatan integrasi data dengan Dukcapil, agar validasi identitas dalam sistem dapat berjalan lebih akurat dan mengurangi penolakan karena perbedaan data.